



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : **BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS KESEHATAN)**
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI
SUB UNIT KERJA : DIREKSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FACHMI IDRIS**
2. Jabatan : **DIREKTUR UTAMA BPJS KESEHATAN**
3. NHK : **165901**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.361.652.000**

1. Tanah Seluas 416 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 83.200.000
2. Tanah Seluas 295 m2 di KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 118.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 493 m2/408 m2 di BOGOR, WARISAN Rp. 244.100.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 268 m2/180 m2 di TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.022.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 391 m2/150 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 331.424.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/64 m2 di AL MUBAROK III RT. 05 RW. 010 Kode Pos. 12230, [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 482.928.000
7. Tanah Seluas 400 m2 di OGAN ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 686.500.000**

1. MOBIL, HONDA CITY SEDAN Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000



3. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 1968, HASIL SENDIRI Rp.	
10.000.000	
4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.	
11.000.000	
5. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.	
200.000.000	
6. MOBIL, TOYOTA VOXY MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.	
380.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 538.680.000
D. SURAT BERHARGA	Rp. 500.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp. 5.451.329.504
F. HARTA LAINNYA	Rp. 1.762.601.500
Sub Total	Rp. 13.300.763.004
III. HUTANG	Rp. 245.712.800
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp. 13.055.050.204

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LINGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.